

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajibannya mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat (Utomo, 2013:5). Perkembangan pembangunan di Indonesia saat ini memerlukan dukungan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta seluruh masyarakat. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki secara optimal.

Dalam Siregar (2009:10) pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan GNP perkapita (*Gross National Product*) atau pendapatan masyarakat meningkat dalam periode waktu yang panjang. Oleh karena itu pembangunan ekonomi memiliki dua sifat penting, yaitu suatu proses yang berarti terjadinya perubahan terus-menerus, dan adanya usaha menaikkan pendapatan perkapita masyarakat.

Salah satu hal yang dilakukan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan, yaitu dengan pembangunan daerah-daerah di Indonesia yang diserahkan kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Daerah Otonom yang

selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar pemerintah daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri, maka diperlukan sumber pembiayaan yang cukup. Salah satu kemampuan suatu daerah terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah otonom memiliki kewenangan serta kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri.

Suatu daerah ataupun provinsi di Indonesia memiliki sumber-sumber pendapatan diantaranya pajak, retribusi dan lain sebagainya dan salah satu sumber dari pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber-sumber dari Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang merupakan 4 jenis pungutan yaitu berupa pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain dari PAD. Dalam hal ini yang akan dibahas yaitu analisis efektifitas pajak daerah, retribusi daerah,

pengelolaan kekayaan dan pendapatan lain sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Tomohon. Menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah yang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sedangkan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2004, mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta. Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan tentang Pendapatan Asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kota Tomohon adalah salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara di Indonesia. Sebelum tahun 2003 merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Minahasa. Dalam perkembangannya, Tomohon mengalami banyak kemajuan,

sehingga ada aspirasi dari warga untuk meningkatkan status Tomohon menjadi sebuah kota. Tomohon menjadi daerah otonom (kota) dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon Di Provinsi Sulawesi Utara oleh DPR RI.

Pemerintah Kota Tomohon menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunannya tentu membutuhkan penerimaan daerah yang nantinya akan mendukung pembiayaan dan pengeluaran daerah. Sumber penerimaan daerah Kota Tomohon berasal dari beberapa sumber pendapatan yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Untuk sumber pendapatan tersebut Pemerintah Kota Tomohon menyusun anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan daerah. Pajak daerah, retribusi Daerah, pengelolaan kekayaan serta pendapatan lainnya adalah bagian penting dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah. Adapun data realisasi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan, pendapatan lainnya dan Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon ditampilkan dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1

Laporan Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelola Kekayaan Yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD Yang Sah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011-2017

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	Lain-Lain PAD Yang Sah
2011	Rp4.031.730.282	Rp1.984.415.540	Rp529.761.910	Rp1.549.121.890
2012	Rp3.774.798.077	Rp1.656.735.083	Rp536.242.206	Rp5.273.859.759
2013	Rp5.458.559.604	Rp2.533.715.961	Rp893.977.601	Rp5.059.086.109
2014	Rp9.755.131.129	Rp1.880.245.228	Rp789.995.731	Rp7.673.402.302
2015	Rp10.650.675.393	Rp2.441.051.862	Rp762.587.592	Rp10.852.346.417
2016	Rp12.435.848.866	Rp3.154.891.726	Rp416.058.868	Rp9.986.281.006
2017	Rp16.045.169.432	Rp3.175.549.876	Rp548.878.090	Rp29.854.813.117

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Tomohon

(Diolah oleh penulis).

Dalam Tabel 1.1 di atas menunjukkan pencapaian dari Pajak Daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan, pendapatan lainnya dan Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. Hal tersebut menunjukkan perkembangan kesejahteraan masyarakat melalui sarana prasarana umum yang akan menunjang perekonomian Kota Tomohon dan hal tersebut merupakan hasil kerja dari seluruh komponen baik pemerintah maupun masyarakat melalui kekompakan dan kebersamaan untuk membangun Kota Tomohon yang lebih maju dan sejahtera.

Dalam hal ini pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan dan pendapatan lainnya merupakan sumber dari Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon dan bisa mempengaruhi efektifitas PAD Kota Tomohon. Semakin besar pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan dan pendapatan lainnya yang diterima maka semakin meningkatnya PAD Kota Tomohon. Dari latar belakang diatas maka saya mengambil judul “ANALISIS EFEKTIVITAS

# **PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, PENGELOLAAN KEKAYAAN, DAN PENDAPATAN LAIN SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2011-2017”**

## **1.2.Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimanakah pertumbuhan pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan dan pendapatan lain di Kota Tomohon dari tahun 2011-2017
- 1.2.2. Bagaimana kontribusi dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan dan pendapatan lain di Kota Tomohon dari tahun 2011-2017
- 1.2.3. Bagaimanakah rasio tingkat efektifitas yang dicapai dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan dan pendapatan lain di Kota Tomohon dari tahun 2011-2017

## **1.3.Batasan Masalah**

Oleh karena ada keterbatasan waktu dan ruang lingkup pembahasan sangat luas, maka penulis hanya membatasi pada pembahasan tentang **Analisis Efektifitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan dan Pendapatan Lain Sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon Tahun 2011-2017.**

## **1.4.Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1. Untuk menganalisis pertumbuhan pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan dan pendapatan lain di Kota Tomohon.

1.4.2. Untuk menganalisis kontribusi dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan dan pendapatan lain di Kota Tomohon.

1.4.3. Untuk menganalisis rasio tingkat efektivitas yang dicapai dari setiap jenis pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan dan pendapatan lain Kota Tomohon.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian atau kontribusi adalah sebagai berikut:

1.5.1. Bahwa dengan adanya pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan dan pendapatan lainnya maka pendapatan asli daerah Kota Tomohon bisa berkembang.

1.5.2. Dengan diketahuinya rasio efektivitas pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan dan pendapatan lain terhadap pendapatan asli daerah maka hal itu dapat menjadi acuan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD-nya dengan melakukan peningkatan terhadap pajak, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan dan pendapatan lainnya.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan laporan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan tesis ini.

**BAB II: KERANGKA TEORITIS**

Berisikan hasil penelitian terdahulu, teori-teori yang menjadi rujukan dan mendukung judul yang diangkat oleh penulis, serta kerangka berpikir .

**BAB III: METODE PENELITIAN**

Berisikan tentang penjelasan metode penelitian yaitu tempat penelitian, rancangan penelitian, sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

**BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisikan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.

**BAB V: PENUTUP**

Berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan yang didapat dari penelitian tersebut.